

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
SEBAGAI SIMPUL KOORDINASI PEMBANGUNAN
PERTANIAN WILAYAH DI KABUPATEN CIANJUR**

***DETERMINANTS DEVELOPMENT CENTER IN AGRICULTURAL EXTENSION
COORDINATION NODE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
IN THE REGION CIANJUR***

Achdiyat*

*Korepondensi Penulis, Email : iachdiyat@yahoo.co.id

Diterima : Juli

Disetujui terbit : Oktober

ABSTRACT

Agricultural extension institutional development prioritizes the principle of partnership with institutional placement strategy as the main driver of agricultural extension activities in each region. This research was conducted in Cianjur regency of West Java Province in 2015 with respondents 62 extension workers from eight agricultural extension centers consisting of 32 women and 30 men with ages ranging from 22 to 58 years aims to describe and analyze the factors that influence the implementation duties and functions, and every determinant factor in influencing the coordination of work in the environment of agricultural extension centers. Data collection through: interview, observation, and recording. The design of this research is a survey method, and explanatory descriptive research type. Independent variables: Institutional Support, Facility Management, and dependent variable: Human Resource Management, and Quality Management. Data analysis with path analysis. The result were variable of institutional support and human resource management have closeness influence to support the implementation of quality management, but for facility management have less influence to quality management quality improvement at agricultural extension center in Cianjur regency. Whereas if combined as a whole the three variables together have a real effect (direct path) in improving quality management.

Keywords: extension hall, facility management, human resource management, institutional support, quality management

ABSTRAK

Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian mengutamakan prinsip kemitraan dengan strategi menempatkan kelembagaan sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing wilayah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dengan responden 62 orang penyuluh dari delapan balai penyuluhan pertanian terdiri dari 32 orang wanita dan 30 orang laki-laki dengan umur berkisar antara 22-58 tahun bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan balai penyuluhan pertanian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pencatatan. Desain penelitian adalah metode survei dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatori. Peubah bebas, berupa Dukungan Kelembagaan, Manajemen Fasilitas, dan peubah tidak bebasnya manajemen sumber daya Insani, dan manajemen mutu. Analisis data dengan *path analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan manajemen sumber daya insani memiliki keeratan pengaruh dalam mendukung terselenggaranya manajemen mutu, namun untuk manajemen fasilitas kurang memiliki pengaruh yang erat terhadap peningkatan kualitas manajemen mutu di balai penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur. Apabila digabungkan secara keseluruhan ketiga peubah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata (jalur langsung) dalam peningkatan manajemen mutu.

Kata kunci: Balai penyuluhan, dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas, manajemen mutu, manajemen sumber daya insani

PENDAHULUAN

Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian adalah mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan pertanian dan memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui prioritas insentif pembiayaan (Deptan, 2007). Sedangkan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Pusluh, 2014).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan juga menjelaskan secara hirarkis kelembagaan penyuluhan, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat berkedudukan di eselon satu masing-masing kementerian, di tingkat provinsi kelembagaan penyuluhan berupa Badan Koordinasi Penyuluhan, di kabupaten/kota berupa Badan Pelaksana Penyuluhan (dalam bentuk BP4K, BKP5, BP4KP, dlsb), sedangkan tingkat kecamatan kelembagaan penyuluhan berbentuk Balai Penyuluhan (BPP, BP3K, BPK atau lainnya).

Balai penyuluhan di tingkat kecamatan memiliki peran sebagai tempat satuan administrasi pangkal (Satminkal)

bagi penyuluh yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja balai. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 diuraikan, bahwa fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan mengamanatkan, bahwa tugas utama Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan (BP3K) adalah; 1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota yang merupakan sintesa antara RKPD-RKPD se-kecamatan dan program-program pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, yang disusun setiap tahun; 2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan yang telah ditetapkan; 3) menyediakan dan menyebarkan informasi tentang teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, 6) memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 7) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Hasil penelitian Jamil (2012) menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K. program Balai Penyuluhan Pertanian adalah tatakelola, BPP, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan suasana kerja. Namun, beberapa hal

yang menjadi faktor penentu pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian belum tergali secara mendalam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab hal tersebut sehingga dapat bermanfaat dalam pembinaan BP3K di seluruh Indonesia. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan faktor yang mempengaruhi BP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian. Secara khusus, bertujuan penelitian adalah untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K, (2) menganalisis pengaruh setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K, dan (3) merancang strategi pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian wilayah kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian didesain sebagai survei deskriptif eksplanatori yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menguji hubungan, dan menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dan dirumuskan sebelumnya. Peubah bebas penelitian adalah dukungan kelembagaan dan manajemen fasilitas, serta peubah tidak bebas yaitu manajemen sumber daya insani dan manajemen mutu.

Penelitian dilaksanakan di kantor BP4K Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan kabupaten tersebut belum memiliki Badan Penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Selain itu Kabupaten Cianjur juga merupakan kabupaten yang sedang berkembang menuju kabupaten modern dengan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Jumlah populasi sebanyak 249 penyuluh pertanian yang

ada di BP4K Kabupaten Cianjur yang tersebar dan bersatminkal di BP3K, termasuk di dalamnya koordinator BP3K, Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas (THL). Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling* dan untuk menetapkan 62 responden menggunakan rumus Slovin (Sevilla *et al.*, 1993:161). Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia berupa analisa jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, responden penelitian sebanyak 62 orang terdiri dari 32 orang wanita dan 30 orang laki-laki dengan tingkat pendidikan: S2 = 2 orang, S1 = 30 orang, D4 = 3 orang, D3 = 11 orang, dan SMK = 16 orang, yang memiliki sebaran umur berkisar antara 22 sampai dengan 58 tahun, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa responden penelitian berada pada golongan usia awal dewasa (*early adulthood*) 18 - 30 tahun dan masa usia dewasa tengah yaitu antara 30-60 tahun (Havigurst, 1974). Pada usia ini biasanya seseorang dalam kondisi yang relatif produktif dalam bekerja dan banyak mencari peluang atau informasi yang menguntungkan bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan pencarian prestise diri.

Responden penelitian terdiri dari unsur koordinator atau kepala BP3K, penyuluh pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Swadaya, serta kasi penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur (41 orang PNS dan 21 orang THL). Rata-rata pengalaman bertugas para penyuluh ini adalah berkisar antara 2-39 tahun. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pengalaman yang cukup lama (39 tahun/usia menjelang purnabakti) dari senior ini memberikan motivasi lebih

kepada para penyuluh muda untuk dapat berkarya lebih baik dalam memberdayakan dan memandirikan petani serta mampu mengarahkan petani untuk mengenali sendiri kebutuhannya dan keberanian mengambil keputusan dalam menghadapi risiko usahatani.

Faktor yang Berpengaruh terhadap Manajemen Mutu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3K

Hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumber daya insani terhadap manajemen mutu pelaksanaan tugas dan fungsinya diperoleh besarnya koefisien adalah 0.882, sementara besarnya pengaruh bersama variabel eksogenus terhadap variabel endogen ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0.777 atau 77.7%. Hal ini berarti pengaruh dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumber daya insani secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembentukan manajemen mutu sebagai faktor yang menentukan pengaruh utama dalam pelaksanaan tugas kelembagaan BP3K di Kabupaten Cianjur sebesar 88.2% dengan tingkat determinasi 77.7%, sementara 22.3% lainnya ditentukan oleh faktor di luar peubah yang dianalisis pada penelitian ini.

Hasil tersebut selaras dengan pengamatan dan wawancara secara mendalam kepada beberapa penyuluh pertanian, di mana para penyuluh pertanian dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bekerja tanpa tekanan karena komponen yang terlibat dalam pengelolaan manajemen BP3K mampu memberikan kenyamanan dan fasilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas para penyuluh pertanian. Ditinjau dari dukungan kelembagaan BP3K yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur dari kedelapan BP3K lokasi penelitian dan secara umum

BP3K lainnya memang telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dari Kepala, Bagian Supervisor, Bagian Program dan Evaluasi. Selain itu, diperkuat juga dengan pendanaan yang memadai untuk operasional. Pemerintah Daerah melalui BP4K Kabupaten Cianjur juga selalu memberikan alokasi dana operasional di luar dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pengelolaan asset yang baik di setiap BP3K memperlihatkan tertibnya manajemen fasilitas dalam menjalankan fungsi dan tugas BP3K. Hal ini terlihat dari adanya pembagian sarana operasional kendaraan bermotor secara adil kepada setiap penyuluh tanpa membedakan status (PNS atau THL), hanya dibedakan dari jenis kendaraannya saja. Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) relatif tepat waktu tidak terlambat dalam pencairannya serta berbagai macam alat peraga yang digunakan dalam proses penyuluhan pertanian juga terawat dengan baik. Pada aspek pengembangan sumber daya insani terlihat dengan meratanya sebaran penyuluh yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan baik program daerah maupun program pusat. Hampir semua penyuluh pertanian PNS telah memiliki sertifikat penyuluh pertanian ahli, terampil maupun alih kelompok serta pelatihan-pelatihan teknis lainnya, sedangkan untuk THL-TBPP secara simultan diikutkan pada pelatihan teknis dan pemberdayaan. Hanya untuk penyuluh swadaya memang proses pengikutsertaan peningkatan kapasitasnya belum terprogram dengan baik sehingga hanya beberapa orang saja yang telah mengikutinya, maka disarankan peningkatan kapasitas yang perlu ditingkatkan dari sisi sumber daya insani adalah pada penyuluh swadaya baik dari segi metode maupun pemberdayaannya.

Berdasarkan hasil analisis statistik dan uraian pengamatan tersebut, maka manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BP3K wilayah kabupaten Cianjur telah berjalan dengan baik, hanya beberapa item saja pada manajemen sumber daya insani yang perlu ditingkatkan, sedangkan untuk fasilitas dan dukungan kelembagaan sudah optimal. Sementara 22.3% lainnya yang mempengaruhi manajemen mutu pelaksanaan tugas, fungsi dan koordinasi kerja yang dipengaruhi oleh faktor di luar ketiga peubah dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumber daya insani, salah satunya yang terungkap ketika wawancara dengan para penyuluh tersebut adalah faktor kepemimpinan kepala BP3K yang cenderung situasional yaitu kadang *task oriented* atau kadang *relationship oriented*. Untuk itu, penelitian selanjutnya hal ini dapat diangkat untuk dapat diteliti secara

lebih lanjut mengenai model kepemimpinan kepala BP3K dalam manajemen mutu terpadunya.

Model Faktor Penentu dalam Mempengaruhi Koordinasi Kerja di Lingkungan BP3K

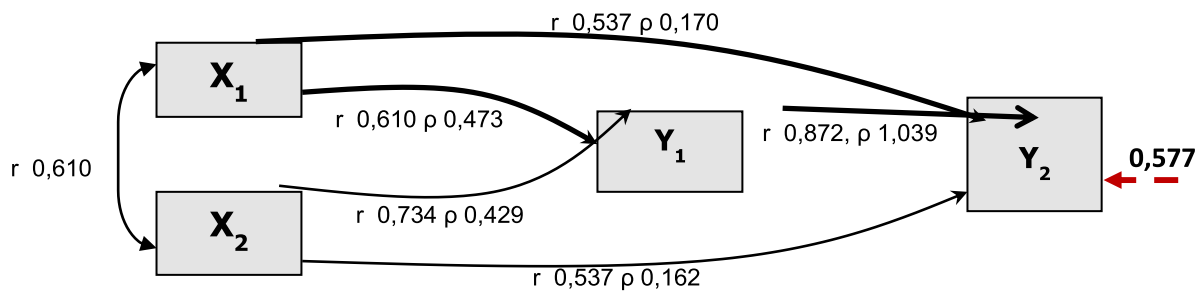
Meskipun ketiga peubah ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan manajemen mutu pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K, namun masing-masing peubah memiliki tingkat koefisien jalur yang berbeda-beda. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada hubungan tiap peubah dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 21 sehingga diperoleh koefisien korelasi (r) sebagaimana pada Tabel 2, yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian (H_1) yang menyatakan, bahwa terdapat korelasi nyata antara peubah bebas terhadap peubah terikat.

Tabel 2 Nilai koefisien korelasi antar peubah penelitian

Korelasi antara	Nilai r
Dukungan kelembagaan (X_1) dengan Manajemen sumber daya Insani (Y_1)	0.717**
Manajemen fasilitas (X_2) dengan Manajemen sumber daya Insani (Y_1)	0.734**
Dukungan kelembagaan (X_1) dengan Manajemen fasilitas (X_2)	0.610**
Dukungan kelembagaan (X_1) dengan Manajemen mutu (Y_2)	0.537**
Manajemen fasilitas (X_2) dengan Manajemen mutu (Y_2)	0.597**
Manajemen sumber daya Insani (Y_1) dengan Manajemen mutu (Y_2)	0.872**

Hasil uji statistik seperti yang tertera pada Tabel 2, diketahui bahwa semua peubah memiliki korelasi yang positif, sesuai dengan analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa sinergisitas koordinasi antara dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumber daya insani akan membawa dampak yang baik terhadap membangun manajemen mutu di BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Semakin bersinergi koordinasinya maka semakin bermutu pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya dalam penyuluhan pertanian. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa memang ketiganya secara bersama-sama

memiliki pengaruh dalam manajemen mutu dilakukan uji F. Hasil analisis Anova, diperoleh koefisien jalur sebesar 67.473**, yang berarti hasil ini memang membuktikan bahwa ketiga peubah memiliki pengaruh langsung dalam membentuk manajemen mutu di BP3K. Berdasarkan hasil-hasil analisis statistik tersebut diperoleh nilai koefisien jalur sebagai berikut: X_1 ke Y_1 sebesar 0.473, X_2 ke Y_1 sebesar 0.429, X_1 ke Y_2 sebesar 0.170, X_2 ke Y_2 sebesar 0.162, dan Y_1 ke Y_2 sebesar 1.039. Berdasarkan nilai koefisien jalur (p), koefisien korelasi (r), dan koefisien error (ϵ), maka diperoleh diagram jalur seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram jalur hasil analisis statistik

Berdasarkan hasil analisis parsial untuk masing-masing peubah dukungan kelembagaan dan manajemen fasilitas terhadap manajemen mutu dengan menggunakan t_{hitung} , didapatkan hasil bahwa untuk peubah dukungan kelembagaan terhadap manajemen mutu memiliki nilai t_{hitung} (1.878) > t_{tabel} (-1.692) atau nilai signifikansi $0.005 < 0.05$, berarti bahwa dukungan kelembagaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen mutu, dan untuk manajemen fasilitas terhadap manajemen mutu memiliki nilai t_{hitung} (0.668) < t_{tabel} (-1.692) atau nilai signifikansi $0.507 > 0,05$, berarti bahwa manajemen fasilitas tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen mutu.

Hasil ini menunjukkan bahwa untuk peubah dukungan kelembagaan memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk manajemen mutu sementara manajemen fasilitas tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen mutu. Hal ini selaras dengan hasil observasi di mana dukungan kelembagaan lebih berpengaruh terhadap pengembangan tugas dan fungsi, pendanaan operasional serta regulasi yang membuat manajemen mutu yang ada di lingkungan BP3K mampu bekerja bebas tekanan dan produktif dalam melaksanakan masing-masing tugas dan fungsinya. Sementara pada manajemen fasilitas tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembentukan manajemen mutu, hal ini dikarenakan manajemen fasilitas lebih kepada rasa nyaman, aman secara fisik

dan terpenuhinya standar-standar. Hal ini menyiratkan bahwa kebutuhan individu di lingkungan kerja BP3K di Kabupaten Cianjur telah berada pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi yaitu lebih kepada kebutuhan aktualisasi diri dan harga diri dibandingkan kebutuhan sosial, keamanan dan fisiologis. Hal ini menandakan bahwa manajemen BP3K telah berada pada tataran yang modern dan kondusif di mana kebutuhan dasar setiap individu telah terpenuhi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil berbeda ditunjukkan pada peubah manajemen fasilitas terhadap pembentukan manajemen mutu BP3K, di mana hasil uji parsial menggunakan uji t diperoleh hasil nilai t_{hitung} (9.858) > t_{tabel} (-1.692) atau nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ berarti, bahwa manajemen sumber daya insani (Y_1) memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen mutu (Y_2), berarti bahwa kedua peubah memiliki pengaruh langsung dalam pembentukan manajemen mutu BP3K.

Berdasarkan hasil analisis data yang terurai tersebut dapat ditarik kesimpulan secara agregat adalah peubah bebas manajemen fasilitas kurang memiliki pengaruh yang erat terhadap peningkatan kualitas manajemen mutu di BP3K yang ada di Kabupaten Cianjur, namun untuk peubah dukungan kelembagaan dan manajemen SDI-lah yang memiliki keeratan pengaruh dalam mendukung terselenggaranya manajemen mutu di

BP3K yang ada di Kabupaten Cianjur, hal ini terlihat pada uji parsial masing-masing peubah. Apabila digabungkan secara keseluruhan ketiga peubah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata (jalur langsung) dalam peningkatan manajemen mutu, model fit analisis jalur untuk kasus ini sebagaimana tersaji pada Gambar 1 di atas.

Strategi pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para penyuluh, diketahui bahwa lemahnya koordinasi antar lini di BP3K karena banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang cenderung mempengaruhi lemah atau tidak efektifnya koordinasi dan integrasi di lingkup BP3K wilayah Kabupaten Cianjur adalah:

1. Perbedaan orientasi antar penyuluh, yakni penyuluh PNS lebih berorientasi pada tugas yang mengarahkan penyuluh THL-TBPP dengan sedikit implementasi, sementara penyuluh THL-TBPP lebih berorientasi pada penyelesaian tugas yang diberikan dari penyuluh PNS yang seolah-olah atasan, dan penyuluh swadaya lebih berorientasi pada kesukarelaan dan kesadaran;
2. Semua pelaku penyuluhan belum memahami paradigma penyuluhan sebagaimana digariskan dalam undang-undang penyuluhan;
3. Belum adanya wadah atau ruang dialog otonom yang dapat mewadahi dan menjadi ruang diskusi dan kerjasama antar penyuluh di tingkat kecamatan;
4. Masih lemahnya penghargaan dari para pelaku penyuluhan terhadap sesama profesinya;
5. Masih lemahnya pemahaman para penyuluh terhadap prinsip

pembangunan pertanian berparadigma agribisnis;

6. Umur penyuluh pertanian PNS yang rata-rata berusia tua juga menjadi hambatan berkoordinasi; dan
7. Status kontrak penyuluh THL-TBPP dengan wilayah kerja yang berpindah-pindah menjadi hambatan bagi keberlanjutan program penyuluhan;

Namun demikian, di sisi kelemahannya beberapa faktor internal cenderung menampilkan kekuatan (positif) adalah:

1. Adanya pertemuan rutin di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, baik pertemuan penyuluh maupun pertemuan para pelaku pembangunan pertanian;
2. Relatif tingginya tingkat pendidikan para penyuluh, pada umumnya para penyuluh sudah berpendidikan sarjana;
3. Pemilikan dan penguasaan media komunikasi (terutama telepon genggam) oleh para penyuluh maupun masyarakat semakin meningkat;
4. Adanya kantor balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan;
5. Sudah terjalin kerjasama antar penyuluh di lapangan, terutama dalam pelaksanaan demplot;
6. Intensifnya kontak antar penyuluh dalam pertemuan persiapan dan sinkronisasi program-program pemberdayaan di tingkat kecamatan;
7. Adanya pelatihan fasilitasi dan pengembangan jejaring komunikasi melalui aplikasi internet; dan
8. Aktifnya kembali musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Sedangkan faktor eksternal yang cenderung mempengaruhi lemah atau tidak efektifnya koordinasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan adalah:

1. Belum terintegrasinya skema pembangunan agribisnis di tingkat kecamatan, baik dalam satu sektor maupun antar sektor;
2. Masih parsialnya pemahaman para pemimpin tingkat kecamatan dan desa terhadap kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan, sehingga kurang memberi terobosan dan alternatif solusi bagi efektivitas koordinasi;
3. Tidak berkelanjutannya program-program (proyek) pembangunan pertanian, sehingga jalinan kerjasama tidak berkelanjutan pula;
4. Masih rumitnya jalur birokrasi;
5. Belum memasyarakatnya budaya kerjasama positif dalam pengelolaan program atau proyek pembangunan, sehingga yang terjadi bukan “bagaimana bersama-sama untuk memberdayakan petani, tetapi bagaimana bersama-sama memaksimalkan keuntungan dan memperdaya para petani;
6. Kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang berbukit dan bergunung diakui oleh para penyuluh dan masyarakat mempersulit mobilitas para pelaku penyuluhan, terutama para penyuluh swadaya setempat; dan
7. Belum intensif dan efektifnya pertemuan para pelaku pembangunan pertanian di pedesaan. Selama ini, pertemuan di tingkat kecamatan maupun desa hanya dilakukan apabila ada program musyawarah pembangunan desa.

Berdasarkan hasil diskusi mendalam dan diskusi terfokus terungkap bahwa sisi eksternal juga memiliki beberapa peluang bagi terciptanya koordinasi dan integrasi, yakni:

1. Meningkatnya program pemberdayaan petani yang digulirkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten;

2. Dikembangkannya metode penelitian partisipatif dan penyuluhan partisipatif, sehingga membuka peluang semua pihak untuk berpartisipasi, seperti dalam program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pertanian; dan
3. Diurusutamakannya pendekatan perencanaan dan pengelolaan partisipatif dalam pembangunan daerah.

Dibandingkan faktor eksternal, faktor internal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kuat dan lemahnya koordinasi dan integrasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Kalaupun ada faktor eksternal yang paling utama adalah fasilitasi dari pemerintah, selebihnya akan ditentukan oleh kesadaran, kesempatan, kemauan dan kemampuan para pelaku penyuluhan itu sendiri. Regulasi bagi koordinasi memang perlu, tetapi kemandirian lebih layak untuk di kedepankan, karena kemandirian merupakan bentuk keberdayaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan, maka sudah saatnya penyuluhan digerakan oleh yang lebih muda, kreatif, inovatif dan berjejaring.

Meningkatkan integrasi dan koordinasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi selama ini eksistensi penyuluhan seperti “detak jantung” naik dan turun. Artinya, membutuhkan strategi agar ketika penyuluhan jatuh pada titik terendah, minimal masih dapat memberikan jalan kegiatan lainnya untuk memandirikan petani berjalan lebih efektif. Mengacu pada pendekatan analisis sebagaimana dipaparkan dalam metodologi, maka strategi dirumuskan melalui SWOT analisis seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat dirumuskan tahapan strategi yang dapat diimplementasi untuk meningkatkan efektivitas BP3K sebagai simpul koordinasi dan integrasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan:

1. Menjadikan BP3K sebagai sekretariat bersama, baik bagi penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta. Hal ini sudah dijelaskan di dalam UU PPPK No. 16 Tahun 2006.
2. Mengaktifkan musrenbang tingkat kecamatan dan desa sebagai forum koordinasi pengelolaan pembangunan pertanian. Selama ini, musrenbang hanya dilakukan pada saat perencanaan program pembangunan, sementara dalam pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tidak dilakukan.
3. Meningkatkan inovasi, demplot, diskusi, pelatihan dan penelitian partisipatif di tingkat desa. Pendekatan ini sangat memungkinkan, karena setiap desa menjadi wilayah kerja (minimal satu orang penyuluh satu desa).
4. Meningkatkan inovasi, demplot, diskusi, pelatihan dan penelitian partisipatif di tingkat desa. Pendekatan ini sangat memungkinkan, karena setiap desa menjadi wilayah kerja (minimal satu orang penyuluh satu desa).
5. Mengoptimalkan penyuluh muda dan pemanfaatan ICT bagi efektivitas koordinasi.
6. Menjadikan UU PPPK sebagai dasar orientasi dan paradigma penyuluhan. Dijelaskan di dalam UU PPPK bahwa orientasi dan paradigma penyuluhan adalah memberdayakan petani yang lemah.
7. Mendirikan dan aktifkan badan pelaksana penyuluhan di kabupaten adalah amanat UU PPPK, juga sebagai wadah bagi penyuluh untuk menghasilkan kesepakatan bersama (aturan main).
8. Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi peran dan tugas antara pelaku penyuluhan, sehingga dapat saling melengkapi dan berbagi kelebihan sumber daya, inovasi dan teknologi.
9. Menjadikan lapangan dan kantor BP3K sebagai ruang dialog dan laboratorium pelatihan dan penelitian bersama.
10. Meningkatkan kerja sama dengan pusat inovasi, lembaga penelitian, perusahaan dan perguruan tinggi bagi pengembangan program bersama yang berkelanjutan, dan
11. Memberi peranan kepada pemerintah desa dan lembaga lokal (karang taruna, pesantren, dsb) sebagai motor penyuluhan dan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan.

Tabel 3 Matriks SWOT Analisis Strategi pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Faktor Internal	Kekuatan 1. Adanya pertemuan rutin di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan; 2. Relatif tingginya tingkat pendidikan para penyuluh; 3. Pemilikan dan penguasaan media komunikasi meningkat; 4. Adanya kantor balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; 5. Sudah terjalin kerjasama antar penyuluh di lapangan; 6. Intensifnya kontak antar penyuluh; 7. Adanya pelatihan fasilitasi dan pengembangan jejaring komunikasi melalui aplikasi internet; 8. Aktifnya kembali Musrenbangdes)	Kelemahan 1. Perbedaan orientasi antar penyuluh; 2. Semua pelaku penyuluhan belum memahami paradigma penyuluhan baru 3. Belum adanya wadah atau ruang dialog; 4. Masih lemahnya penghargaan; 5. Masih lemahnya pemahaman pada pembangunan pertanian; 6. Faktor Usia; dan 7. Status kontrak penyuluh THL-TBPP;
Faktor Eksternal Peluang 1. Meningkatnya program pemberdayaan petani; 2. Dikembangkannya metode penelitian penyuluhan partisipatif; 3. Diurusutamakannya pendekatan perencanaan dan pengelolaan partisipatif dalam pembangunan daerah.	Strategi A 1. Menjadikan BP3K sebagai sekretariat bersama; 2. Mengaktifkan musrenbang tingkat kecamatan dan desa sebagai forum koordinasi pengelolaan pembangunan pertanian; 3. Meningkatkan inovasi, demplot, diskusi, pelatihan dan penelitian partisipatif di tingkat desa dan 4. Optimalkan penyuluh muda dan pemanfaatan ICT bagi efektivitas koordinasi	Strategi B 1. Jadikan UU PPPK sebagai dasar orientasi dan paradigma penyuluhan 2. Dirikan dan aktifkan badan pelaksana penyuluhan di kabupaten adalah amanat UU PPPK, juga sebagai wadah bagi penyuluh untuk menghasilkan kesepakatan bersama (aturan main) 3. Kembangkan kemitraan dan kolaborasi peran dan tugas antara pelaku penyuluhan
Ancaman 1. Belum terintegrasinya skema model pembangunan; 2. Masih parsialnya pemahaman para pemimpin tingkat kecamatan dan desa; 3. Tidak berkelanjutannya program-program (proyek) pembangunan pertanian; 4. Masih rumitnya jalur birokrasi; 5. Belum memasyarakatnya budaya kerjasama; 6. Kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang berbukit dan bergunung ; dan 7. Belum intensif dan efektifnya pertemuan para pelaku pembangunan pertanian di pedesaan.	Strategi C 1. Jadikan lapangan dan kantor BP3K ruang dialog dan laboratorium pelatihan dan penelitian bersama 2. Tingkatkan kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga yang terlibat	Strategi D Perankan pemerintah desa dan lembaga lokal (karang taruna, pesantren, dsb) sebagai motor penyuluhan dan pembangunan pertanian

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani secara bersama-sama mempengaruhi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K di wilayah Kabupaten Cianjur.
2. Dukungan kelembagaan menjadi satu-satunya faktor penentu yang tidak mempengaruhi secara langsung koordinasi kerja di lingkungan BP3K wilayah Kabupaten Cianjur.

3. Strategi yang dapat diimplementasi untuk meningkatkan efektivitas BP3K sebagai simpul koordinasi dan integrasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan adalah dengan menjadikan BP3K sebagai sekretariat bersama, baik bagi penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta. Mengaktifkan musrenbang tingkat kecamatan dan desa sebagai forum koordinasi pengelolaan pembangunan pertanian. Meningkatkan inovasi, demplot, diskusi, pelatihan dan penelitian partisipatif di tingkat desa dengan mengoptimalkan penyuluh muda dan pemanfaatan ICT bagi

efektivitas koordinasi. Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi peran dan tugas antara pelaku penyuluhan, sehingga dapat saling melengkapi dan berbagi kelebihan sumberdaya, inovasi dan teknologi dan menjadikan lapangan dan kantor BP3K sebagai ruang dialog dan laboratorium pelatihan dan penelitian bersama.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disarankan:

1. Koordinasi dan integrasi akan terwujud apabila semua pelaku di lingkungan BP3K memahami pembangunan pertanian sebagai sistem (kesatuan), para pelaku saling memahami peran dan posisi strategisnya, serta ada ruang yang memungkinkan semua pelaku dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Untuk itu, aktifkan dan efektifkan relasi penyuluh, petani, peneliti, pengusaha dan perguruan tinggi.
2. Peningkatan koordinasi antar penyuluh dan lembaga hendaknya dimulai dari yang paling memungkinkan, yakni aktifkan badan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten, jadikan BP3K sebagai sekretariat bersama (basis koordinasi) dan kelompok tani sebagai basis fasilitasi, kembangkan musrenbandes ke arah pengelolaan bersama (bukan hanya untuk perencanaan), tingkatkan kegiatan pelatihan dan penelitian dan membangun kerjasama dengan BUMN/BUMS melalui CSR sebagai aksi untuk menguatkan institusi dari sisi sumber daya inovasi dan finansial operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [Deptan] Departemen Pertanian. 2007. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Jakarta (ID): Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian.
- Banunaek, Musa F, Suminah, Karsidi R. Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. September 2017. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13, No. 2.
- Firmansyah, Amanah S, Sadono D. Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Penyuluhan Kehutanan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Maret 2015. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 11, No. 1.
- Havighurst R J. 1974. *Development Tasks and Education*. Third Edition. New York (US): David McKay Company, Inc.
- Herawati, Pulungan I. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Kontaktani dalam Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian. September 2006. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 2, No. 2.
- Jamil M H. 2012. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Sulawesi Selatan. (*Disertasi*). Bogor Sekolah Pascasarjana, IPB.
- Marliati, Sumardjo, Pang S. A, Tjiptopranoto P, Saefudin A. Faktor-faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pemberdayaan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). September 2008. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4, No. 2.

- Marius, Ardu J, Sumardjo, Margono S, Pang S A. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyuluh terhadap Kompetensi Penyuluh di Nusa Tenggara Timur. September 2007. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 2.
- [Pusluh] Pusat Penyuluhan. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan*. Jakarta (ID). Kementerian Pertanian.
- Pramono H, Fatchiya A, Sadono D. Kompetensi Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Garut, Jawa Barat. September 2017. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13. No. 2.
- Sevilla C.G, Ochave J.A, Punsalan T.G, Regala B.P., Uriarte G.G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia Press.
- Wijayanti N, Paranoan DB, Kalalinggi R. Analisis Tingkat Kepuasan Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Kabupaten Kutai Timur. 2015. *eJournal Administrative Reform*, Volume 3 Nomor 2, 2015: 263-275.